



Manajemen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam

Salsabila Azharia Putri¹, Hafzana Bedasari²

^{1,2} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

salsabila.azharia0221@student.unri.ac.id, hafzana@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the performance management of the Batam City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors and to identify factors affecting the effectiveness of enforcement. The study employed a qualitative case-study design and referred to Armstrong's performance management cycle, comprising planning, implementation, performance review, and reward. Data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and reviews of planning documents and performance reports, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that enforcement planning and implementation were conducted systematically through target setting, standard operating procedures, patrol scheduling, socialization, warning letters, coaching, and enforcement actions. Administratively, all recorded public-order violations in 2025 were reported as resolved. Nevertheless, field effectiveness was not sustainable because several street vendors returned to previously cleared locations. This condition was influenced by limited operational vehicles, inconsistent post-enforcement monitoring, insufficient relocation areas, weak coaching, and suboptimal cross-sector coordination. Performance reviews were conducted periodically, but their follow-up actions had not fully prevented recurring violations. In addition, a formal reward mechanism for active high-performing personnel was not yet available. Strengthening interagency coordination, renewing operational facilities, optimizing technology-based monitoring, providing alternative trading spaces, and establishing performance-based rewards are required to make street-vendor management more effective, sustainable, and humane.

Keywords: Performance Management, Satpol PP, Street Vendors, Armstrong Model.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan mengacu pada siklus manajemen kinerja Armstrong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan penghargaan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan kinerja, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan penertiban telah berjalan sistematis melalui penyusunan target, SOP, patroli, sosialisasi, pemberian surat peringatan, pembinaan, dan tindakan penertiban. Secara administratif, seluruh kasus pelanggaran pada tahun 2025 tercatat diselesaikan. Namun, efektivitas lapangan belum berkelanjutan karena sejumlah PKL kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan armada operasional, belum konsistennya pengawasan pascapenertiban, keterbatasan lokasi relokasi, lemahnya pembinaan, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Peninjauan kinerja telah dilakukan secara berkala, tetapi tindak lanjutnya belum sepenuhnya mengatasi keberulangan pelanggaran. Selain itu, penghargaan khusus bagi personel aktif berprestasi belum tersedia. Penguatan koordinasi, peremajaan sarana, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, penyediaan ruang usaha alternatif, serta sistem penghargaan berbasis prestasi diperlukan agar penertiban berlangsung lebih efektif, terukur, berkelanjutan, akuntabel, dan manusiawi bagi masyarakat Kota Batam setempat.

Kata Kunci: Manajemen Kinerja, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima (PKL), Model Armstrong.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan sektor informal merupakan salah satu konsekuensi dari pesatnya perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun, keberadaan PKL yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum sebagai lokasi berdagang sering kali menimbulkan permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum, seperti kemacetan lalu lintas, terganggunya hak pejalan kaki, serta berkurangnya kualitas tata ruang perkotaan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya mewujudkan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman.

Sebagai salah satu kota industri dan perdagangan terbesar di Indonesia, Kota Batam menghadapi permasalahan serupa. Meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai pusat perdagangan turut mendorong pertumbuhan jumlah PKL yang berjualan di ruang publik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP dituntut tidak hanya mampu melakukan penertiban, tetapi juga menjaga keberlanjutan ketertiban umum melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif.

Secara administratif, kinerja Satpol PP Kota Batam menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kota Batam Tahun 2022–2025, sebagian besar indikator kinerja mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2025 beberapa indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, seperti Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) sebesar 106,52% dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 104,80%. Selain itu, sepanjang tahun 2025 Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap ribuan Pedagang Kaki Lima yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Batam. Data tersebut menunjukkan bahwa organisasi mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, tingginya capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah PKL masih kembali berjualan pada lokasi yang sama setelah kegiatan penertiban dilaksanakan. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara awal dengan Kepala Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Batam yang menyatakan bahwa penertiban PKL mulai menjadi fokus utama pada tahun 2025, sementara pelaksanaan operasi masih banyak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT). Akibatnya, pengawasan pascapenertiban belum berlangsung secara konsisten sehingga aktivitas PKL kembali muncul di beberapa titik yang sebelumnya telah ditertibkan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kinerja organisasi yang tinggi dengan efektivitas pelaksanaan penertiban dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Penelitian mengenai penertiban PKL telah banyak dilakukan, terutama dari perspektif implementasi kebijakan, efektivitas penegakan peraturan daerah, maupun faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pedagang. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada hasil penertiban atau implementasi kebijakan, sementara kajian yang menganalisis penertiban PKL melalui perspektif manajemen kinerja organisasi masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam menjelaskan bagaimana sistem manajemen kinerja memengaruhi keberhasilan pelaksanaan penertiban secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori Manajemen Kinerja Armstrong (2009) untuk menganalisis pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Batam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada efektivitas kebijakan, penelitian ini memandang penertiban sebagai bagian dari proses manajemen kinerja organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kinerja. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan antara capaian indikator kinerja organisasi dengan kondisi faktual di lapangan sekaligus memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif informan, sedangkan desain studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara komprehensif (Creswell 2018). Penelitian ini difokuskan pada manajemen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam dengan menggunakan perspektif Manajemen Kinerja Armstrong (2009).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan beberapa titik penertiban PKL di Kecamatan Batam Kota. Lokasi tersebut dipilih secara *purposive* karena merupakan kawasan dengan intensitas aktivitas PKL yang tinggi sekaligus menjadi wilayah yang paling sering dilakukan operasi penertiban oleh Satpol PP. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan penelitian (Sugiyono, 2023). Informan terdiri atas pejabat struktural dan personel Satpol PP Kota Batam, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Pedagang Kaki Lima (PKL), masyarakat pengguna jalan, konsumen, serta pemilik usaha yang terdampak oleh aktivitas PKL.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penertiban PKL serta aktivitas pengawasan di lapangan. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan dalam

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12500>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menjelaskan pengalaman dan pandangannya terhadap pelaksanaan penertiban (Kallio et al., 2016). Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kota Batam, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2023, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penertiban PKL. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan (Patton, 2015). Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Proses analisis dilakukan secara berulang sejak pengumpulan data hingga diperoleh tema-tema yang menjelaskan manajemen kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Batam.

3. Hasil dan Pembahasan

Manajemen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batam

Penelitian ini menganalisis manajemen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan teori siklus manajemen kinerja Armstrong (2009) yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, peninjauan kinerja, dan penghargaan. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Satpol PP Kota Batam, Dinas Perdagangan, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APLI), pedagang kaki lima, serta masyarakat sekitar lokasi penertiban.

Perencanaan Kinerja

Tahap perencanaan menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Batam telah menyusun sistem perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perencanaan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal patroli, pemetaan kawasan rawan PKL, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penentuan kebutuhan anggaran operasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa target organisasi telah diterjemahkan menjadi target kerja individu sehingga setiap personel memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan melalui rapat bersama perangkat daerah sebagai upaya menyamakan strategi penertiban di lapangan.

Tabel 1. Target Sasaran Kinerja Satpol PP Kota Batam Tahun 2024–2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
1	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	16,70%	20,00%	25,00%
2	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Perkada	16,70%	20,00%	25,00%
3	Optimal Kualitas Layanan Pendukung	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariat	86,00	88,00	90,00

Sumber: Rencana Kinerja Satpol PP Kota Batam, 2026

Data perencanaan menunjukkan adanya peningkatan target penurunan pelanggaran ketertiban umum dari tahun ke tahun. Namun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan target tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sumber daya organisasi.

Tabel 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Batam Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Mini Bus	3 Unit	1	1		1
2	Bus	1 Unit			1	
3	Pick Up	4 Unit	1	2		1
4	Truk Angkutan Personil	4 Unit	1			3
5	Truk Angkutan Barang	2				2

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12500>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
6	Sepeda Motor	8 Unit	3			5
7	Handy Talky (HT)	10 Unit	5			5
8	Pakaian PHH (Lengkap Dengan Tameng dan Tongkat)	38 Set	38			

Sumber: LkjIP Satpol PP Kota Batam, 2026

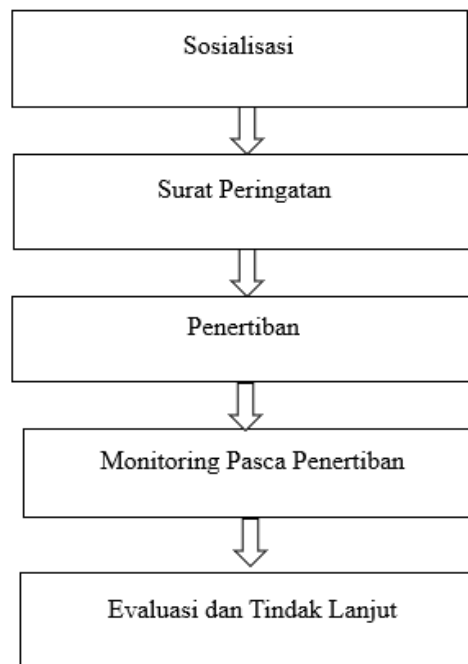
Sebagian besar kendaraan operasional berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat sehingga membatasi mobilitas personel ketika melakukan patroli dan penertiban. Selain itu, perubahan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan anggaran pada sebagian besar program operasional sehingga ruang gerak organisasi menjadi lebih terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif tahap perencanaan telah sesuai dengan konsep *performance and development planning* Armstrong (2009), karena organisasi telah menetapkan tujuan, indikator kinerja, serta pembagian tugas yang jelas. Akan tetapi, efektivitas perencanaan belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan anggaran dan sarana operasional yang mempengaruhi implementasi program.

Pelaksanaan Kinerja

Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pemberian Surat Peringatan (SP1 sampai SP3), pembinaan kepada pedagang, dan tindakan penertiban apabila pedagang tetap melanggar ketentuan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP lebih mengedepankan tindakan persuasif dibandingkan tindakan represif.

Gambar 1. Alur Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kota Batam



Alur penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Batam dimulai dengan sosialisasi peraturan kepada pedagang, dilanjutkan pemberian surat peringatan secara bertahap. Jika peringatan tidak dipatuhi, dilakukan penertiban atau pembongkaran lapak yang melanggar. Setelah itu, dilakukan monitoring dan pengawasan untuk mencegah pedagang kembali berjualan di lokasi terlarang, kemudian dievaluasi sebagai dasar perbaikan efektivitas penegakan peraturan daerah. Tahapan tersebut diperkuat dengan dokumen surat peringatan dan pelaksanaan penertiban di lapangan yang menunjukkan bahwa tindakan pembongkaran baru dilakukan setelah seluruh prosedur administratif dipenuhi.

Tabel 3. Realisasi Penanganan Pelanggaran Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran / Kegiatan Operasional	Jumlah Kasus Ditemukan	Jumlah Kasus yang diselesaikan	Tingkat Penyelesaian
1	Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	456 Kasus	456 kasus	100,00%
2	Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada	623 Kasus	623 Kasus	100,00%
3	Penangan Aksi Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa	30 Aksi	30 Aksi	100,00%

Sumber: Laporan Kinerja (LkjIP) Satpol PP Kota Batam, 2026

Data menunjukkan seluruh kasus pelanggaran berhasil diselesaikan secara administratif. Meskipun demikian, hasil observasi menemukan bahwa sejumlah PKL kembali berjualan pada lokasi yang sama setelah penertiban dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja adalah keterbatasan koordinasi dengan Disperindag dan APLI dalam melakukan pembinaan serta penyediaan lokasi relokasi. Akibatnya sebagian pedagang kembali menggunakan ruang publik sebagai lokasi berjualan. Menurut Armstrong (2009), tahap pelaksanaan menuntut adanya pengelolaan kinerja secara berkelanjutan melalui bimbingan, pengawasan, dan penyesuaian selama proses berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek tersebut belum berjalan optimal karena monitoring pasca-penertiban belum dilakukan secara konsisten.

Peninjauan Kinerja

Satpol PP Kota Batam melaksanakan evaluasi kinerja setiap akhir triwulan dengan membandingkan capaian operasi terhadap target SAKIP. Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan operasional selama pelaksanaan penertiban.

Tabel 4. Analisis Review Kinerja Satpol PP Kota Batam Berdasarkan Armstrong (2009)

Indikator Armstrong (2009)	Temuan Penelitian	Analisis
Membandingkan target dan realisasi	Satpol PP melakukan evaluasi triwulan dengan membandingkan hasil penertiban terhadap target SAKIP.	Sesuai teori karena terdapat pengukuran hasil terhadap target.
Menilai pencapaian hasil kinerja	Penurunan pelanggaran dinilai berdasarkan capaian indikator kinerja.	Penilaian dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai.
Mengidentifikasi hambatan kinerja	Kendala meliputi keterbatasan relokasi, pembinaan, dan armada operasional.	Sesuai teori karena evaluasi mencakup faktor penghambat kinerja.
Menilai efektivitas pelaksanaan program	PKL masih kembali berjualan setelah penertiban.	Efektivitas belum optimal karena hasil belum berkelanjutan.
Menilai efektivitas pelaksanaan program	PKL masih kembali berjualan setelah penertiban.	Efektivitas belum optimal karena hasil belum berkelanjutan.
Efektivitas belum optimal karena hasil belum berkelanjutan.	Masih terjadi fenomena “kucing-kucingan” antara PKL dan petugas.	Hasil penertiban belum mampu dipertahankan secara berkelanjutan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar target kuantitatif berhasil dicapai. Namun demikian, observasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara capaian administratif dengan kondisi nyata di masyarakat.

Tabel 5. Perbandingan Penilaian Internal dan Kondisi Lapangan

Aspek Penilaian	Penilaian Internal Satpol PP	Kondisi Lapangan Berdasarkan Temuan Penelitian
Capaian Kinerja .	Penurunan Pelanggaran Dinilai Memuaskan Dan Capaian Kinerja Tinggi.	PKL Masih Ditemukan Kembali Di Lokasi Yang Telah Ditertibkan.
Pelaksanaan Penertiban.	Penertiban Berjalan Sesuai Prosedur Dan Target Operasi.	Penertiban Belum Memberikan Efek Jerah Yang Berkelanjutan.

Aspek Penilaian	Penilaian Internal Satpol PP	Kondisi Lapangan Berdasarkan Temuan Penelitian
Pengawasan Pasca Penertiban.	Telah Dilakukan Melalui Patroli Dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat.	Pengawasan Dinilai Belum Konsisten Sehingga Pkl Kembali Berjualan.
Pembinaan Pedagang .	Dibantu Melalui Koordinasi APLI Dan Instansi Terkait.	Peran Apli Belum Optimal Karena Keterbatasan Pengurus Dan Sarana Organisasi.
Sarana Pendukung	Tersedia Armada Dan Fasilitas Operasional.	Banyaknya Kendaraan Operasional Mengalami Kerusakan Sehingga Menghambat Patroli.
Respons Terhadap Aduan Masyarakat	Tersedia Aplikasi Siap Garda Sebagai Saluran Pengaduan Cepat	Efektivitas Masih Bergantung Pada Kecepatan Tindak Lanjut Dan Konsistensi Pengawasan.
Keberlanjutan Ketertiban	Dinilai Berhasil Menurunkan Jumlah Pelanggaran.	Ketertiban Belum Sepenuhnya Terjaga Karena Muncul Kembali Pkl Lama Maupun Baru

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Perbedaan tersebut terlihat dari masih ditemukannya PKL yang kembali berjualan pada lokasi yang telah ditertibkan, lemahnya pembinaan oleh APLI, keterbatasan armada operasional, serta belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAP GARDA sebagai media pengaduan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses *review* telah dilakukan sesuai siklus manajemen kinerja Armstrong melalui kegiatan evaluasi berkala. Akan tetapi, tindak lanjut hasil evaluasi belum mampu menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan sehingga efektivitas penertiban masih relatif rendah.

Penghargaan Kinerja

Penghargaan kinerja di lingkungan Satpol PP Kota Batam masih didominasi oleh penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memasuki masa purna tugas. Sementara itu, penghargaan bagi personel aktif lebih banyak diwujudkan dalam bentuk kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan prestasi kerja serta rekam jejak pegawai.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Penunjang Kinerja Aparatur Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	Persentase Realisasi (%)
1	Belanja Administrasi & Tunjangan ASN/TKD)	30.569.971.499	30.358.081.360	99,31%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.453.551.339	48.848.373.980	98,78%
3	Kegiatan Administrasi (Fasilitas Kepegawaian / Pelatihan / Atribut)	952.508.000	856.170.000	89,89%
Total		51.097.719.439	50.351.111.880	98,54%

Sumber: Realisasi Anggaran Program Laporan Kinerja (LKjIP) Satpol PP Kota Batam, 2026

Realisasi anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap kesejahteraan aparatur melalui pembayaran gaji, tunjangan, dan program pengembangan kompetensi. Selain penghargaan individual, Satpol PP Kota Batam juga memperoleh penghargaan kelembagaan pada tingkat nasional yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kinerja organisasi. Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa sistem penghargaan bagi anggota lapangan belum berjalan secara optimal karena belum tersedia mekanisme khusus yang memberikan apresiasi terhadap personel berprestasi.

Menurut Armstrong (2009), penghargaan merupakan bagian penting dalam menjaga motivasi kerja pegawai. Oleh karena itu, pengembangan sistem penghargaan berbasis prestasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat agar mampu meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan Satpol PP dalam penertiban PKL.

4. Kesimpulan

Manajemen kinerja Satpol PP Kota Batam dalam penertiban PKL telah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan penghargaan. Perencanaan, target, SOP, sosialisasi, surat peringatan, serta tindakan penertiban telah berjalan sistematis. Namun, keberhasilan administratif belum sepenuhnya menghasilkan ketertiban berkelanjutan karena PKL masih kembali berjualan. Hambatan utama meliputi keterbatasan armada,

anggaran pengawasan, lokasi relokasi, pembinaan, koordinasi lintas sektor, dan penghargaan personel. Oleh karena itu, efektivitas penertiban memerlukan pemerajaan sarana, pengawasan pascaoperasi yang konsisten, penyediaan ruang usaha alternatif, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas organisasi, serta sistem penghargaan berbasis prestasi agar ketertiban ruang publik dapat dipertahankan secara berkelanjutan, tertib, aman, adil, serta semakin manusiawi bagi masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang telah memberikan izin penelitian serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batam, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Reference

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Armstrong, M. (2009). *Performance management*. Kogan Page.
- Daulay, V., & Rusli, Z. (2022). Penertiban reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 815–832.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. A. (2020). *Analisis data penelitian*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hidayatullah, R. (2025). Manajemen kinerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5, 76–87.
- Khoiriah. (2022). *Metode penelitian*. Universitas Lampung.
- Luturmas, Y. (2020). Rekrutmen aparatur desa terhadap peningkatan kinerja pemerintah di Desa Analutur, Kecamatan Babat Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. *Journal Adbispower: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu Administrasi*, 1(1), 77–91.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harva Creative.
- Nupus, N. (2020). *Manajemen kinerja pegawai Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Pekanbaru* (Skripsi).
- Panjaitan, M. (2023). *Manajemen kinerja*. Media Sains Indonesia.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktik*. IAIN Kediri Press.
- Rianto, P. (2020). *Modul metode penelitian kualitatif*. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
- Rizki, V. L. (2021). Pengaruh tindakan afirmatif dan budaya organisasi terhadap manajemen kinerja PT Bintang Sayap Utama Area Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v9i1.635>
- Rumbrawe, W. A. P., Boari, Y., & Lestari, E. D. (2023). Dampak COVID-19 terhadap UMKM (Studi kasus pedagang kaki lima di Kelurahan VIM). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 341–354. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.5780>
- Sataruddin, Suprianto, & Daeng, A. (2020). Analisis kualitatif keberadaan pedagang kaki lima. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 168–179.
- Sina, I. (2024). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu sains*. Widina Media Utama.
- Sinaga, D. (2023). *Buku ajar metodologi penelitian* (Aliwar, Ed.). UKI Press.
- Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Priyoadmiko, E., Butarbutar, M., Purba, S., Karwanto, Silalahi, M., Hidayatulloh, A. N., et al. (2020). *Manajemen kinerja dalam organisasi*.
- Situmeang, L. K. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 167–186.
- Sugiyanta, Y. (2024). *Manajemen kinerja*. Pusat Karir dan Riset STIE.
- Sulistiyawati. (2023). *Penelitian kualitatif: Metode penelitian kualitatif* (Vol. 5). K.Media.
- Supriatna, A., Sunarsi, D., & Purnamasari, R. I. (2022). *Metode penelitian*. LITNUS.
- Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., Arisah, N., & Tahta. (2022). *Wawancara*. Tahta Media Group.
- Tinambunan, A. P. (2024). Implementasi manajemen kinerja di Unika Santo Thomas Medan. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 171–188. <https://doi.org/10.54367/kukima.v3i2.4220>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi penelitian sosial*. PT Bumi Aksara.
- Utomo, S. C., Darmawan, A., & Hidayat, S. (2023). Implementasi manajemen kinerja administrasi kependudukan sebagai strategi peningkatan mutu sumber daya manusia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7455–7466.